

MANAJEMEN KEUANGAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS

Yusuf Fatkul Yogi^{1*}

UIN Sunan Ampel¹, Surabaya, Indonesia

*yusuf.fatkul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian mengenai implemntasi Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa manajemen keuangan dijalankan sepenuhnya oleh pengasuh pondok pesantren dibantu dengan istrinya. Adapun kebijakan gratis yang dibuat oleh KH, Fabrudin Siswopranoto berjalan dengan lancar karena dari penghasilan yang lebih dari cukup itu dialokasikan untuk membiayai santri tanpa dipungut biaya sedikitpun. Faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen keuangan yaitu dukungan dari keluarga besar pondok pesantren. Sedangkan untuk faktor penghambat yakni untuk masalah manajemen keuangan adalah ketika uang habis, dikarenakan keperluan yang melenceng dari rencana. Solusinya dengan menggadaikan surat-surat BPKB kendaraan dan diberlakukanya koperasi santri untuk perputaran keuangan.

Keyword : *Manajemen Keuangan, Kebijakan Pendidikan Gratis*

LATAR BELAKANG

Manajemen Keuangan adalah besarnya jumlah anggaran pendidikan yang berkisar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan angin segar bagi dunia pendidikan. Kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1. Hal yang seperti itu membuat tenaga pendidik salah satunya Top Manajer sangat gembira, karena saat itu juga kebutuhan pendidikan sedikit demi sedikit akan segera terpenuhi sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan. Terkadang dengan adanya anggara 20% yang diberikan oleh pemerinta itu tidak bisa dirasakan oleh semua pendidikan yang ada dinegara Indonesia ini, bisa dikatakan pendidikan yang maju karena beberapa hal dan Manajemen Keuangan ini sangat diperlukan dalam pendidikan untuk menunjang kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Harsono (2007), sekolah gratis adalah sekolah dimana anak-anak dan orang tua tidak harus membayar biaya yang di kelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran dan uang buku. Menurut UU bab XIII ayat 31 tentang pendidikan, pendidikan gratis memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan nasional.

Pondok Pesantren adalah suatu fenomena sosial-budaya yang mempunyai nilai sistem tersendiri dan dipelihara, seperti sistem penghormatan seperti penghormatan murid kepada guru yang tidak terbatas, sistem nilai yang diterima sepanjang dapat memelihara sistem tradisionalisme, terutama pada hubungan yang hierarki itu, sistem ketaatan dan sistem nilai yang membuat batas-batas wilayah otoritas dalam pengembangan ortodoksi, lebih-lebih sistem etika belajar yang merupakan aktualisasi dari kitab Ta'lim al-muta'allim karya Syaikh al-Zarnuji. Pondok pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam khas Indonesia yang didirikan oleh masyarakat.

Kebijakan pendidikan gratis di pondok pesantren dilatar belakangi oleh penyebaran pendidikan berbasis Islam yang kurang merata sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan terutama kalangan kurang mampu. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan sokongan dana kepada anak-anak mereka yang mencari ilmu di pondok pesantren juga menjadi dorongan dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis ini. Selain itu, terdapat keinginan yang kuat dalam diri para santri yang kurang mampu secara finansial untuk tetap melanjutkan belajar mereka di pondok pesantren. Dari beberapa alasan tersebut dapat menjadi pendorong untuk menerapkan kebijakan pendidikan gratis di lingkungan pondok pesantren.

Secara detail, sumber keuangan ini dinyatakan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 48 tahun 2008 pasal 51 :

1. Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: anggaran pemerintah, anggaran pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
2. Dana pendidikan satuan pendidikan yang sah diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari : anggaran pemerintah, bantuan pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau walinyayang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepenyingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat.
3. Dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari : Bantuan pemerintah daerah, Bantuan pemerintah, pungutan dari peserta didik atau walinyayang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepenyingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat.
4. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari : bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, bantuan dari pemerintah, bantuan dari pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat.

Kebijakan menurut Nugroho dilihat dari empat kuadran tersebut termasuk dalam kuadran I sehingga diperlukan partisipasi aktif sektor diluar pemerintah. Argumentasi yang bisa dibangun bahwa pendidikan sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada bidang pendidikan yang dicapai penduduknya, hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat meliputi perencanaan, pembuatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian kebijakan adalah strategi pemerintah dan sektor-sektor dibawahnya untuk mengemukakan kebijakan pendidikan yang lebih bagus lagi. Karena, dengan kebijakan yang bagus maka akan terciptanya kualitas pendidikan yang bagus pula. Adapun pengertian kebijakan, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt kebijakan adalah

Sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

H.A.R Tilaar menjelaskan bahwa "Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu".

Aspek-aspek yang tercakup di dalam kebijakan pendidikan meliputi:

1. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan.
2. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan.
3. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu.
4. Keterbukaan (openness)
5. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan.
6. Analisis kebijakan.
7. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik.
8. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis.
9. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
10. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi.
11. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik.
12. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional.
13. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.
14. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat.

Dalam pandangan Priyanto, pendidikan gratis adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat tergantung pada perhitungan tentang biaya satuan di sekolah. Istilah pendidikan gratis yang tercantum dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap. Untuk mewujudkan pendidikan gratis, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yakni melalui kebijakan pendanaan massal pendidikan dengan meluncurkan program pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS bertujuan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Menurut UU bab XIII ayat 31 tentang pendidikan, pendidikan gratis memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. John Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai upaya "konservatif" dan "progresif" dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan formasi, rekapitulasi dan retrospeksi dan sebagai rekonstruksi. Selama ini banyak anak didik yang berpotensi tetapi dengan minimnya perekonomian keluarga sehingga mereka tidak dapat untuk belajar. Dengan itu

penyelenggaraan pendidikan gratis atau bantuan dari pemerintah harus terlaksana, karena dengan adanya bantuan dana dari APBD akan dapat terlaksana sebuah proses belajar bagi siswa yang kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memiliki ciri-ciri konteks dan setting alamiah, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, keterlibatan secara mendalam serta hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, teknik pengumpulan data tanpa adanya manipulasi variabel, adanya penggalian nilai yang terkandung dari suatu perilaku, fleksibel, serta tingkat akurasi data dipengaruhi oleh hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan beberapa alasan berikut. Pertama, karena pertanyaan yang diajukan dimulai dengan kata bagaimana (how) dan apa (what). Kata-kata tersebut mengarah kepada suatu alur berpikir “apa yang terjadi” dan “bagaimana bisa terjadi”. Alur berfikir tersebut menginginkan informasi yang berkaitan dengan alasan dan penjabaran dari suatu fenomena yang terjadi yang membuat peneliti ingin mencari tahu secara mendalam esensi dari fenomena tersebut. Kedua, karena topik yang diangkat benar-benar perlu untuk dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, karena adanya kebutuhan untuk menyajikan topik atau fenomena secara lebih detil dan terperinci. Keempat, untuk mempelajari subjek dalam latar alamiah tanpa adanya perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Kelima, karena ketertarikan peneliti untuk menulis dalam bentuk lebih bebas. Keenam, karena peneliti memiliki waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai dalam mencari subjek dengan keunikan tertentu dan mampu menggali informasi yang dibutuhkan serta mampu melakukan analisis secara tepat. Ketujuh, pendekatan ini menjadikan peneliti sebagai active learner yang menceritakan fenomena yang dialami murni dari sudut pandang subjek daripada bercerita atas nama dirinya sebagai seorang “ahli”. Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, metode survei, metode dokumentasi, metode focus group discussion, dan teknik triangulasi.

Analisis data adalah proses penghimpun atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, dengan melalui tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

No.	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Latar Penelitian	
	a. Pondok Pesantren	P
2.	Teknik Pengumpulan Data	
	a. Wawancara	W
	b. Observasi	O
	c. Studi Dokumentasi	D
3.	Sumber Data	
	a. Informan I	FS
	b. Informan II	Ag
	c. Informan III	Ar
	d. Informan IV	AK
	e. Informan V	M
4.	Fokus Penelitian	

No.	Aspek Pengkodean	Kode
	a. Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis	F1
	b. Tujuan Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis	F2
	c. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis	F3
	d. Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis	F4
5.	Waktu Kegiatan: Tanggal-Bulan-Tahun	/01-01-2001

Tabel 1. Pengkodean Data Penelitian

Pengkodean ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data hasil penelitian. Sebagai contoh peneliti melakukan wawancara kepada informan I tentang fokus penelitian Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis, bertempat di sekolah pada tanggal 06 Mei 2019, maka pengkodean yang sesuai dengan pedoman diatas adalah: (P.W.FS.F1/06-05-2019).

Hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasikan pada kancah dan subjek yang berbeda. Menurut beberapa ahli, hasil penelitian kualitatif juga dapat diterapkan untuk kancah dan subjek yang berbeda jika memiliki karakteristik yang sama. Namun, hasil penelitian kualitatif perlu diuji terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknik. Ada beberapa uji tingkat kepercayaan hasil penelitian kualitatif, diantaranya: Keandalan (Credibility), Keteralihan (Transferability), Kebergantungan (Dependability), Ketegasan (Confirmability),

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis

Manajemen keuangan adalah aktivitas organisasi yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling dana perusahaan/ lembaga pendidikan.

Menurut Ustad Agung manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

"Manajemen Keuangan yang saya ketahui adalah bagaimana seseorang itu pandai dalam memainkan model keuangan dengan cara mereka masing-masing sesuai ilmu yang dimilikinya, contoh saya ingin memainkan keuangan dengan berbasis ilmu ekonomi itu pendapat saya dan pasti beda lagi dengan orang lain cara memainkan keuangan dengan cara seperti apapun sesuai kemampuan masing-masing." (P.W.Ag.F1/06-05-2019)

Dari penjelasan diatas tentang manajemen keuangan sangat penting dan harus dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan pondok pesantren. Karena, dengan menerapkan manajemen keuangan yang bagus akan mendatangkan proses pengelolaan khususnya keuangan yang bagus pula didalam menjalankan pengembangan pondok pesantren. KH. Fahrudin Siswopranoto juga berbicara tentang manajemen keuangan pondok pesantren kalimasada "secara struktural yang mengelola keuangan pondok pesantren hanya saya dan istri saya, dari pemasukan sampai pengeluaran untuk pondok pesantren yang mengelola itu saya dan istri saya

tetapi terkadang ada saran dari dewan asatidz asatidza untuk membantu kekurangan yang saya dan istri saya lakukan dan tidak ada pembukuan yang formal untuk alur keuangan kami, hanya coretan-coretan saja dikarenakan seluruh pembiayaan pondok pesantren murni dari saya dan istri saya. Secara prasaran yang lain mengenai gedung dan lain-lain saya meminta bantuan dengan mengajukan proposal kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Provinsi dan lain-lain untuk penyaluran dana buat pembangunan gedung di yayasan kami. Karena itu semua berkat dan barokah dari keaktifan saya diorganisasi sehingga saya memanfaatkan jaringan teman, saudara atau teman organisasi yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan biaya gedung sepenuhnya dari donatur-donatur tapi uang saya dan istri saya pun tetap terpakai untuk kekurangannya.” (P.W.FS.F1/06-05-2019)

Dari hasil temuan lapangan mengenai manajemen keuangan Pondok Pensantren Kalimasada peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen keuangan sangat perlu untuk dilaksanakan sebagai keberlangsungan keuangan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Manajemen Pondok Pensantren Kalimasada bersumber dari KH. Fahrudin Siswopranoto sepenuhnya dan pondok pesantren ini memakai sistem keluarga dimana disitu semuanya keluarga yang harus belajar dengan nyaman, sehingga dalam pengelolaan atau manajemen keuangan pondok pesantren sepenuhnya yang mengatur KH. Fahrudin Siswopranoto. Lanjut pada Pondok Pensantren Kalimasada Jombang yang membuat kebijakan pendidikan gratis yang dikemukakan oleh pengasuh pondok pesantren yakni KH. Fahrudin Siswopranoto antara lain:

"kebijakan gratis itu dimana seorang pemimpin membuat kebijakan gratis sesuai peraturan dan kebudayaan daerah setempat. Didalam pondok pesantren ini saya terapkan gratis keseluruhan bukan gratis setengah-setengah, seperti yang ada dalam pendidikan negeri lainnya menerapkan kebijakan gratis untuk peserta didik hanya setengah dan jika tidak mempunyai uang, ketika peserta didik sudah mempunyai uang maka akan ditarik untuk membayar beda dengan sistem pondok pesantren kami yang menerapkan gratis secara keseluruhan. Artinya kami membiayai santri kami secara gratis bagi siapa yang ingin menyantri di pondok pesantren kami tanpa dipungut biaya sedikitpun." (P.W.FS.F1/06-05-2019)

Dari hasil temuan lapangan tersebut peneliti sangat mengapresiasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh KH. Fahrudin Siswopranoto bahwa beliau membuat kebijakan yang sangat tepat di era yang seperti ini, karena banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai anaknya untuk keberlangsungan proses belajar dan di pondok pesantren ini jawaban dari masyarakat kurang mampu yang ingin anaknya belajar sesuai kebutuhannya dengan gratis. Dari teori yang dikemukakan oleh ahli dan pendapat yang berhasil peneliti himpun dari berbagai informan diatas bahwa setiap orang mempunyai pandangan dan cara tersendiri dalam melakukan atau mengimplementasikan manajemen keuangan, begitu pula implementasi manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang. Implementasi manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang melibatkan Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta Istrinya dalam mengelola keuangan Pondok Pesantren. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta Istrinya bahwa secara struktural yang mengelola keuangan Ponpes Kalimasada Jombang adalah beliau beserta istri.

Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta Istrinya mengelola keuangan mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Pemasukan sebagian besar bersumber dari uang pribadi Ketua

Yayasan Kalimasada Jombang beserta Istrinya, sehingga terkadang banyak ditemukan kekurangan dana dalam proses pembiayaan Ponpes Kalimasada Jombang. Kekurangan dana dalam pembiayaan akan dibantu oleh dewan asatidz yang lain dengan mencari sumber dana yang dapat membantu biaya operasional pondok pesantren.

Secara operasional pondok pesantren didanai murni oleh uang pribadi Ketua Yayasan Kalimasada Jombang, namun untuk pembangunan sarana dan prasarana, Ketua Yayasan Kalimasada Jombang mengajukan proposal ke berbagai pihak sebagai sumber dana, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Provinsi dan lain-lain. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang tidak merasa kesulitan dalam mencari sumber dana. Hal ini berkat keaktifan beliau dalam berorganisasi. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang memanfaatkan jaringan pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan sebagai donatur yayasan. Meskipun demikian, dalam suatu kesempatan sumber dana pembangunan sarana dan prasarana juga tetap dari uang pribadi Ketua Yayasan Kalimasada Jombang. Pengelolaan keuangan dan sumber keuangan yang berasal dari Ketua Yayasan Kalimasada juga dibenarkan oleh para dewan asatidz/ah. Ketua Yayasan dan Istrinya membiayai semua operasional pondok pesantren dengan berniatkan shodaqoh. Menurut pandangan agama islam, apabila seseorang membelanjakan harta di jalan Allah maka terdapat keberkahan dalam setiap hartanya, dan apabila kita bershodaqoh maka akan dilipatgandakan harta kita olehNya. Hal ini juga dibuktikan dengan Ketua Yayasan tidak pernah kekurangan dana secara signifikan untuk terus membiayai operasional Pondok Pesantren.

Manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang dilakukan secara sederhana, dengan pengelolaan keuangan dilakukan sendiri oleh Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya, meskipun terdapat struktur resmi di pondok pesantren, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, namun sistem manajemen di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang tetap menggunakan sistem kekeluargaan. Alur keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang pun tidak dibukukan secara resmi, mengingat sumber pendaan berasal dari uang pribadi Ketua Yayasan. Ponpes Kalimasada Jombang menerapkan kebijakan gratis kepada santri yang belajar dan sekolah di bawah naungan Yayasan Kalimasada Jombang. Biaya sekolah 3 tahun pertamah murni ditanggung oleh Yayasan.

Namun, dalam kenyataan di lapangan banyak anak-anak yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya. Berawal dari keresahan tersebut Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Ponpes Kalimasada Jombang membuat kebijakan pendidikan gratis bagi para santri dan siswa yang belajar di bawah naungan yayasannya. Kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang terlaksana berkat Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya yang telah menjadi sokongan utama dalam sumber dana. Kebijakan ini diambil dengan memperhatikan peraturan dan kebudayaan daerah setempat. Kebijakan pendidikan gratis diambil karena banyak masyarakat kurang mampu yang ingin menyekolahkan anaknya. Banyak masyarakat yang belum mampu untuk membiayai keberlangsungan proses belajar anak-anak mereka namun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melihat anak-anak mereka mengenyam pendidikan yang baik.

Meskipun Ponpes Kalimasada Jombang tidak menarik biaya sedikitpun kepada para santri, Ponpes Kalimasada Jombang masih tetap bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Dapat dilihat dari pembangunan gedung yang dilakukan secara terus menerus. Kualitas pendidikannya pun tidak diragukan. Semakin bertambah tahun, peminat masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka semakin besar. Setiap tahun terdapat pertambahan jumlah santri di Ponpes Kalimasada Jombang. Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang ini dengan menggratiskan seluruh biaya tanpa membebankan sedikitpun kepada santri dan orang tua santri. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain, yang terkadang membuat kebijakan pendidikan gratis namun masih memungut biaya dengan dalih infaq.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Keuangan

Dalam membuat sebuah rencana baik rencana yang kurang matang sampai dengan rencana yang paling matang akan selalu ada kegagalan yaitu penghambat dan juga pastinya ada faktor pendukungnya. Disini KH. Fahrudin Siswopranoto mengungkapkan bahwa:

"ketika saya menjalankan proses keuangan pondok pesantren pastinya menemui hal-hal yang mendukung dan bahkan penghambat ditengah jalan, faktor pendukung sangat banyak dari yang pertama keutamaan ibadah yang membuat kami selalu sadar akan kekuasaan ALLAH SWT yang maha kaya, sehingga kami termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan dengan cara sodaqoh dan mengelola keuangan dengan baik. Hal kedua keluarga besar pondok pesantren yang senantiasa mendukung dalam proses manajemen keuangan dengan cara para santri mandiri membuat koperasi pondok untuk membantu keuangan pondok pesantren, sehingga hati kami tersentuh untuk selalu bersungguh-sungguh melaksanakan tugas yang mulia ini yaitu memanajemen keuangan-keuangan pondok pesantren dengan baik. Adapun yang ketiga yakni penghasilan saya dan istri saya yang lebih dari cukup untuk membiayai keperluan pondok pesantren." (P.W.FS.F3/06-05-2019)

Ustadz Agung sebagai Ustadz sekaligus guru di pondok pesantren kalilmasada mengungkapkan tentang yang dialaminya yaitu:

"sesulit apapun penghambat itu jika kita hadapi dengan kepala dingin dan dukungan dari orang sekitar dan pastinya dengan bantuan keilmuan dari berbagai pihak, maka akan dapat terselesaikan dengan baik dan selama ini memang didalam Pondok Pensantren Kalimasada untuk faktor penghambat hanya jika kehabisan uang selebihnya belum ada" (P.W.Ag.F3/13-05-2019)

Hal tersebut diperjelas langsung oleh pengasuh pondok pesantren KH. Fahrudin Siswopranoto:

"jika diperjelas keuangan Pondok Pensantren Kalimasada untuk mengenai kebutuhan keseharian sumbernya murni dari saya tetapi untuk kebutuhan pembangunan gedung ada donatur dari para Dewan Provinsi tetapi tidak 100% murni dibiayai, tetapi ada keuangan saya yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya saya ikut sertakan dalam menutupi kekurangan pembangunan gedung dan pastinya pembangunan gedung

cukup memakan biaya yang banyak, dari peristiwa itulah keuangan kami merosot atau faktor penghambat dari manajemen keuangan kami." (P.W.FS.F3/06-05-2019)

Dapat penulis simpulkan dari berbagai pendapat diatas tentang faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan manajemen keuangan yaitu tidak ada permasalahan yang begitu besar hanya saja permasalahan keuangan untuk keseharian yang habis untuk menutupi kekurangan pembangunan gedung yayasan kalimasada, dan faktor pendukung yang muncul di internal pondok pesantren sendiri yang membuat semangat kepada stakeholder pondok pesantren untuk menjalankan keuangan atau manajemen keuangan dengan baik.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pendidikan Gratis

KH. Fahrudin Siswopranoto menjelaskan tentang faktor pendukung dalam membuat kebijakan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada antara lain:

"dalam topik kali ini lebih kepada faktor pendukung daripada penghambat, karena saya membuat kebijakan ini dengan niatan sodaqoh dari hasil saya yang lebih dari cukup jadi tidak ada faktor penghambat dalam membuat kebijakan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada ini. Faktor pendukung memang ada yaitu keutamaan ibadah yang membuat kami selalu sadar akan kekuasaan Allah SWT yang maha kaya, sehingga kami termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan dengan cara sodaqoh dan membuat kebijakan gratis untuk santri. Faktor kedua yaitu keluarga besar pondok pesantren yang senantiasa mendukung dalam proses belajar yang semangat dan dengan dibantu cara para santri mandiri membuat koperasi pondok untuk membantu keuangan pondok pesantren, sehingga hati kami tersentuh untuk selalu bersungguh-sunggu melaksanakan tugas yang mulia ini yaitu membuat kebijakan gratis untuk mereka di Pondok Pesantren Kalimasada. Adapun yang ketiga yakni penghasilan saya dan istri saya yang lebih dari cukup untuk membiayai keperluan pondok pesantren sehingga saya berinisiatif untuk membiayai belajarnya para anak didik yang ingin menyantiri di pondok kalimasada dengan gratis." (P.W.FS.F3/06-05-2019)

Dapat penulis simpulkan dari pendapat diatas lebih kepada faktor pendukung dalam membuat kebijakan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada. Dari penghasilan KH. Fahrudin Siswopranoto yang lebih sehingga ada inisiatif membuat kebijakan gratis atau dalam deskripsinya membiayai proses belajar santri dengan gratis tanpa adanya pungtutan sedikitpun. Setiap kebijakan yang dibuat oleh sebuah lembaga pendidikan akan menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaannya. Tidak terkecuali yang dialami oleh Ponpes Kalimasada Jombang dalam menerapkan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis. Faktor pendukung kebijakan pendidikan gratis paling utama adalah ridho dan kekuasaan Allah SWT. Dengan kuasa Allah SWT Yang Maha Kaya, maka kebijakan pendidikan di Ponpes Kalimasada Jombang masih dapat terlaksana, bahkan pelaksanaannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, yang menjadi faktor pendukung adalah dewan asatdz yang selalu mendukung proses berjalannya kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan. Kepercayaan orang tua/wali santri dalam menitipkan putra-putrinya juga sangat penting menunjang semangat juang dalam melaksanakan kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Spirit santri dalam mendalami ilmu juga merupakan faktor pendukung berlangsungnya penerapan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada ini. Faktor penghambat dalam

pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan adalah keterbatasan dana di suatu waktu tertentu. Hal ini dikarenakan pembiayaan terbesar murni dari uang pribadi Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya.

3. Solusi dari Hambatan

Adapun solusi dari faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen keuangan yang dikemukakan oleh KH. Fahrudin Siswopranoto adalah

"solusi kami jika kehabisan uang untuk belanja pondok pesantren yaitu dengan menggadaikan BPKB kendaraan yang kami miliki untuk menutupi keuangan pondok pesantren agar tetap terlaksana proses belanja kebutuhan sehari-hari pondok pesantren. Dari solusi tersebut sudah dapat menyelesaikan permasalahan keuangan pondok pesantren, ide itu muncul bukan hanya dari saya melainkan dari istri saya." (P.W.FS.F4/06-05-2019)

Hambatan dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang adalah tentang keterbatasan dana pada waktu-waktu tertentu, maka solusi yang diambil adalah mengupayakan untuk mencari tambahan dana keuangan. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu mengusahakan yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Salah satunya adalah menggadaikan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk menutupi kekurangan dana dalam operasional pondok pesantren.

Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar berwirausaha sedari kecil.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Kalimasada Jombang, dapat peneliti simpulkan bahwa

Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu mengusahakan yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Salah satunya adalah menggadaikan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk menutupi kekurangan dana dalam operasional pondok pesantren. Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar berwirausaha sedari kecil. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu mengusahakan yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Salah satunya adalah menggadaikan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk menutupi kekurangan dana dalam operasional pondok pesantren.

Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar berwirausaha sedari kecil.

Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu mengusahakan yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Salah satunya adalah menggadaikan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk menutupi kekurangan dana dalam operasional pondok pesantren.

Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar berwirausaha sedari kecil.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan lapangan sampai pada analisis temuan lapangan tentang manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada, penulis dapat membuat simpulan sebagai berikut:

1. Manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada jombang. Dalam menerapkan atau mengelola keuangan pondok pesantren dari hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan dijalankan sepenuhnya oleh pengasuh pondok pesantren dibantu dengan sang istri, meskipun terdapat struktur pondok tetapi pengelolaan sepenuhnya di manajemen oleh KH. Fahrudin Siswopranoto selaku pengasuh yayasan kalimasada. Adapun kebijakan gratis yang dibuat oleh KH, Fahrudin Siswopranoto berjalan dengan lancar karena dari penghasilan yang lebih dari cukup itu di alokasi kan untuk membiayai santri tanpa dipungut biaya sedikitpun sehingga sampai saat ini implementasi kebijakan gratis berjalan dengan lancar.
2. Tujuan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada jombang. Tujuan dari membuat kebijakan gratis adalah untuk membantu memberikan wadah belajar kepada golongan masyarakat yang kurang mampu, dan yang terpenting yaitu untuk men sodaqoh kan kelebihan dari penghasilan pengasuh Pondok Pesantren Kalimasada.
3. Faktor pendukung dan penghambat manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada jombang. Faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen keuangan yaitu dukungan dari keluarga besar pondok pesantren dan untuk faktor pendukung dari membuat kebijakan gratis adalah kurang mampunya masyarakat menengah kebawah yang ingin membawa anaknya ke jenjang pendidikan dan faktor keuangan yang senantiasa lancar. Sedangkan untuk faktor penghambat yakni untuk masalah manajemen keuangan adalah ketika uang habis, dikarenakan keperluan yang melenceng dari rencana, sehingga mengakibatkan adanya suatu hambatan dalam menggunakan keuangan untuk kesehariannya. Faktor penghambat untuk membuat kebijakan pendidikan gratis hampir tidak ada permasalahan dari hasil penelitian di Pondok Pesantren Kalimasada.
4. Solusi dari hambatan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada jombang. Solusi dari hambatan manajemen keuangan hasil penelitian adalah dengan menggadaikan surat-surat BPKB kendaraan untuk menutupi kekurangan keuangan dan diberlakukanya koperasi santri untuk perputaran keuangan Pondok Pesantren Kalimasada.

Sebagai akhir dari penyusunan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa point sebagai saran untuk dijadikan perbaikan bagi pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada jombang. Peneliti berharap, hal ini akan membawa perbaikan di masa yang akan datang.

1. Perbaiki sistem manajemen pondok pesantren mengenai pembukuan keuangan, dari sumber-sumber keuangan, sampai pada pengeluaran keuangan. Gunanya agar dapat dengan mudah untuk mengontrol keuangan pondok pesantren.
2. Dari segi pengelolaan supaya dibagi sesuai jobdisk yang telah dibentuk, gunanya untuk mempermudah dalam melakukan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas, 2006
- Arwildayanto, Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. JABAR: Widya Padjadjaran, 2017
- Echdar, Saban. Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Fattah, Nanang. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. Cetakan ke-3
- Hamim, Thoha. Wawasan Keislaman dan Kebangsaan di Era Kontemporer. Yogyakarta: Dialektika, 2017.
- Harahap, Hotmaida. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Labuhan Batu Selatan. Medan: UIN Sumatra Utara, 2008.
- Harmono. Manajemen Keuangan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Herdiansyah, Haris. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huriyah, Lilik. Manajemen Keuangan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Imron, Ali. Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Kemdikbud RI. www.paudni.kemdikbud.go.id/.../PP-48-th-2008-ttg-pendanaan-pendidikan diunduh tanggal 14 April 2019
- Kristiawan, Muhammad, Dian Safitri, Rena Lestari. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Minarti, Sri. Manajemen Sekolah. Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2011.
- Mughits, Abdul. Kritik Nalar Fiqh Pesantren. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muhdi, Ahmad Adip. Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. Pasuruan: Cipta Pusaka Utama, 2017.
- Mulyono. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010.
- Mulyono. Manajemen Administrasi & Organisasi pendidikan. Yogyakarta : Ar-ruzz media, 2008
- Munadi, Muhammad, Barnawi. Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011
- Musfiquon. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Mustari, Muhammad. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rajawali, 2014.
- NU Online. "Pesantren Kalimasada Terapkan Konsep Keberkahan Holistik", diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/73034/pesantren-kalimasada-terapkan-konsep-keberkahan-holistik>, pada Tanggal 03 Maret 2019, Pukul 02:09
- Nugroho, Yob S. Mewujudkan Tata ruang Kota yang Partisipatif. Solo Pos, 16 Juli, 2003.
- Rahardjo, Dawam. Kritik Nalar Fiqh Pesantren. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Saefullah. Manajemen Pendidikan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Salim, Agus, Ali Forman. Pengantar dan Berfikir Kualitatif dalam Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Sartono, Agus. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: FE UGM 2001. Cet ke-1

- Sekretaris Jendral MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan ketetapan MPR RI. Jakarta: Cet.XII.
- Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta, edisi revisi 2005.
- Sulistiyorini. Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Sulthon, M. Khusnuridlo. Manajemen Sekolah dalam Perspektif Global. Yogyakarta: laksBang PRESSindo.
- Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Syamdodo, Muhammad Dikky. "Manajemen Pondok Pesantren Gratis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Musanni Gemolong Sragen)" Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.
- Tilaar, HAR, Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Usman, Husaini. Manajemen Terori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014. Cet. 4
- V.A, Nurr Berlian. "Pendidikan dan kebudayaan, Model Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten atau Kota dan Dampaknya di Tingkat Sekolah dan Orangtua" 15. Ed I 2009